

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal yakni:

1. Pada tahun 2019 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan Anggaran Berbasis kinerja dengan mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan yang di buat, terlebih dahulu harus memiliki Renstra (Perencanaan Strategis) yang disusun dengan objektif dan juga melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan, Renja (Rencana Kerja), RKA (Rencana Kerja Anggaran), DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran), LRA (Laporan Realisasi Anggaran), APBD yang di dalamnya terdapat pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
2. Dalam proses implementasi ini terdapat beberapa tahap dari struktur anggaran tersebut tampak bahwa anggaran berbasis kinerja dalam implementasinya harus dilaksanakan secara terpadu dan bertahap yaitu, mulai dengan(1) Tahap Perencanaan Anggaran dengan menentukan anggaran dan membuat Renstra (PerencanaStrategis). (2) Ratifikasi anggaran merupakan tahap pengesahan anggaran yang buat dengan RKA (Rencana Kerja Anggaran) ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur. (3) . Implementasi Anggaran Dalam proses ini dilakukan penggunaan anggaran kegiatan yang kemudian di pertanggungjawakan

dengan hasil pencapaian kinerja. (4) evaluasi Secara keseluruhan pada tahun 2019 DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa dikatakan cukup efisien dalam mengelola anggaran keuangan daerah dengan menunjukkan adanya penurunan tingkat efisiensi yang mengindikasikan telah dilakukan perbaikan kinerja oleh pemerintah

6.2 Saran

Dari hasil pembahasan serta kesimpulan yang diambil oleh peneliti, peneliti memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Dalam merencanakan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur harus melibatkan seluruh komponen dengan membuat Renstra (Perencanaan Strategis) Renja (Rencana Kerja), RKA (Rencana Kerja Anggaran), DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran), LRA (Laporan Realisasi Anggaran), APBD yang di dalamnya terdapat pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. dalam menunjang kegiatan pemerintahan dalam pelayanan publik, perlu dilakukan kajian secara mendalam sehingga anggaran yang direalisasikan dapat sesuai dengan target yang telah di tetapkan.
2. Pemerintah Daerah yang daerahnya belum masuk dalam kategori PTSP Daerah Prima perlu melakukan pengkajian ulang terhadap birokrasinya sehingga pelayanan publik lebih baik lagi. Selain hal tersebut, daerah yang memperoleh alokasi dana untuk kegiatan Bina Administrasi Kewilayahan dan Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah (PTSP Prima di Daerah) perlu

meniru strategi dari daerah yang masuk dalam kategori PSTP Prima sehingga kedepannya alokasi dana yang diberikan menjadi lebih efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Dan Pembangunan Nasional (Bappenas 2009 ; 20)
- Dewi, Kadek Ayu Yulianita, Et Al. *"Evaluasi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buleleng."* *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 2.1 (2014).
- Fahmi, I. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan: Panduan Bagi Akademisi, Manajer, Dan Investor Dan Menganalisis Bisnis Dari Aspek Keuangan*. Alfabeta.
- GASB (Governmental Accounting Standards Board)
- Hery. (2015). *Analisis Kinerja Manajemen*. Gramedia Widiasarana.
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- LKIP 2019 DPMPTS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
- Mardiasmo, M. B. A. *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi, 2021.
- Munawir, S. (2002). *Analisa Laporan Keuangan*. UPP-AMP-YKPN.
- Mursitawati, Kurnia. *"Evaluasi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Badan Layanan Umum (BLU)(Studi Pada Fakultas "X" Universitas "Y")."* *Jurnal Ilmiah FEB UB* (2014).
- Nanda, Reza, And Darwanis Darwanis. *"Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif Pada Dinas Dpkkd Kabupaten Aceh Selatan)."* *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 1.1 (2016): 327-340.
- Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurhayati, S. (2012). *Metodologi Penelitian Praktis Edisi 2 (2 Ed.)*. Fakultas Ekonomi Univ. Pekalongan
- PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Prihadi, T. (2020). *Analisis Laporan Keuangan Konsep Dan Aplikasi*. PT Gramedia Pustaka Umum.
- Rudianto. (2013). *Akuntansi Manajemen*. Penerbit Airlangga.
- Sawir, A. (2018). *Analisis Kinerja Keuanagn Dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. PT Gramedia Pustaka Umum.
- Sirait, P. (2014). *Pelaporan Dan Laporan Keuangan*. Graha Ilmu.

- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press.
- Undang – Undang Nomor 32 Dan 33 Tahun 2004 Serta Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta. Kementerian Dalam Negeri
- Weston, J. F., & Copeland, T. E. (1995). *Manajemen Keuangan*.
- Wibisono, Seto, And Ikhsan Budi Riharjo. *"Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah."* *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 5.9 (2016).
- Yulianto, N. A. B., Maskan, M., & Utaminingsih, A. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. UPT Percetakan Dan Penerbitan Polinema.
- Zikri, Nahyan. *"Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Pada Kantor Kecamatan Pontianak Barat."* *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi Untan (Kiafe)* 3.4.